

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa WALHI secara efektif berperan sebagai pengamat masyarakat sipil yang terakreditasi selama negosiasi Perjanjian Plastik INC 2024, khususnya dalam sesi-sesi krusial INC-4 dan INC-5.1. Meskipun menghadapi hambatan struktural yang berat, seperti pembatasan akses ke sesi penyusunan draf informal dan kelompok kontak, WALHI memanfaatkan otonomi organisasinya untuk berfungsi sebagai pengawas kelembagaan yang independen.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa WALHI memanfaatkan statusnya sebagai pengamat resmi untuk berperan sebagai lembaga pengawas independen yang vital dalam tata kelola lingkungan global kontemporer. Dalam kapasitas ini, WALHI berhasil mengungkap dan mempublikasikan integrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pelobi komersial bahan bakar fosil dan petrokimia secara langsung di dalam delegasi resmi negara, terutama dengan menyoroti konflik kepentingan di dalam Delegasi Republik Indonesia (DELRI). Fungsi pengawasan ini membawa transparansi yang esensial ke dalam proses diplomatik tertutup, sekaligus menantang cara aktor industri secara sistematis memengaruhi mandat negosiasi negara dan mengorbankan integritas lingkungan.

Selain memantau dominasi negara dan korporasi, keterlibatan WALHI sepanjang sesi INC 2024 ditandai dengan kritik teknis yang ketat terhadap “solusi palsu” yang didukung korporasi dan dipasarkan secara agresif di sela-sela negosiasi. Evaluasi kebijakan yang dilakukan organisasi ini menunjukkan bahwa inovasi komersial seperti daur ulang kimia, pembakaran limbah untuk menghasilkan energi, dan kredit penyeimbangan plastik justru melanggengkan emisi bahan kimia beracun dan memperparah perubahan iklim global dengan kedok transisi hijau. Dengan memberikan perspektif alternatif yang kuat, WALHI memperkuat perannya sebagai suara epistemik yang otoritatif dalam menentang narasi yang didorong oleh industri.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa advokasi WALHI dalam kerangka INC sangat berfokus pada upaya menantang sikap defensif dan akomodatif yang dipertahankan oleh delegasi negara-negara berkembang, terutama terkait perlindungan ekonomi domestik. Melalui analisis sistematis terhadap dokumen-dokumen negosiasi resmi negara, WALHI dan mitra koalisinya mengungkap bagaimana posisi nasional secara konsisten memprioritaskan ekspansi petrokimia domestik dan investasi industri bernilai miliaran dolar di atas langkah-langkah perlindungan lingkungan yang mengikat. Dengan secara vokal menentang penolakan pemerintah terhadap pembatasan produksi hulu, WALHI bertindak sebagai penyeimbang struktural yang esensial terhadap kompromi yang disetujui negara.

Pada akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan prosedural, polarisasi geopolitik yang mendalam, dan penundaan INC-5.1 di Busan yang tidak menghasilkan keputusan, partisipasi WALHI sangat berperan penting dalam menentang pelemahan standar industri dan mempertahankan ambisi lingkungan yang tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa NGO bidang lingkungan memainkan peran yang tak tergantikan dalam rezim lingkungan global dengan menentang dominasi korporasi, mengungkap praktik “*corporate capture*”, dan mendorong tuntutan mendesak akan pendekatan siklus hidup yang komprehensif untuk mengatasi krisis plastik global.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Akademis

Analisis Perbandingan Antar Wilayah

Para akademisi sebaiknya dapat melakukan analisis perbandingan antar wilayah dalam konteks partisipasi *Non-Governmental Organization* (NGO) dan negosiasi lingkungan internasional seperti proses *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) dalam proses Perjanjian Plastik merujuk pada

pendekatan akademis terstruktur yang secara sistematis membandingkan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sipil beroperasi, memobilisasi, dan memberikan pengaruh di berbagai wilayah geografis, ekonomi, dan politik (misalnya, membandingkan NGO dari Global Selatan dengan Global Utara, atau membandingkan negara-negara berkembang di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika).

Menilai Perkembangan Kerangka Kerja INC yang Mengikat versus Kerangka Kerja yang Sukarela

Para akademisi dapat melakukan pemantauan jangka panjang (dari pengesahan UNEA 5/14 sampai dengan penutupan INC 5.1 di Busan) untuk melacak tarik-menarik struktural antara instrumen yang mengikat (batasan produksi hulu yang wajib) dan mekanisme yang bersifat sukarela (skema daur ulang yang dipimpin industri). Analisis tersebut diharapkan dapat melihat perubahan struktural untuk mengetahui apakah pengawasan berkelanjutan dari masyarakat sipil berhasil memaksa pengetatan institusional atau apakah lobi industri justru melemahkan efektivitas jangka panjang dari sistem tersebut.

6.2.2. Saran Praktis

Meningkatkan Transparansi Delegasi

Pemerintah nasional, khususnya delegasi Republik Indonesia (DELRI), harus menerapkan pedoman konflik kepentingan yang ketat dan transparan serta kriteria inklusi yang jelas untuk mencegah pemangku kepentingan korporasi dan industri secara langsung mempengaruhi mandat negosiasi resmi negara. Selama INC-4 dan INC-5, investigasi independen dan pemantauan masyarakat sipil mengungkapkan bahwa para pelobi dari perusahaan bahan bakar fosil dan kimia telah menyusup langsung ke dalam delegasi resmi negara. Dengan menetapkan protokol transparansi yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa tim negosiasi nasional tetap bertanggung jawab

terhadap mandat kepentingan publik dan keamanan ekologis, bukan terhadap lobi industri swasta.

Memperkuat Perwakilan Akar Rumput

Sekretariat INC harus mereformasi kebijakan akses pengamat untuk memastikan bahwa komunitas adat dan perwakilan masyarakat sipil di garis depan tetap dapat berpartisipasi secara langsung dan prosedural tanpa hambatan dalam semua kelompok kontak informal dan sesi penyusunan draf. Mereformasi kerangka kelembagaan ini sangat penting untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan struktural, memastikan bahwa mereka yang menanggung beban polusi plastik global secara tidak proporsional dapat secara langsung menyumbangkan keahlian dan pengetahuan mereka dan melindungi mata pencaharian mereka dalam proses perumusan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S., et al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif.
https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony* (Vol. 54). Princeton: Princeton university press.
- Krasner, S. D. (1983). *International regimes*. Cornell University Press.
<https://www.scribd.com/doc/300632441/Krasner-International-Regimes>
- Sumbodo, Y. P., Marzuki, Yudhantara, S. M., et al. (2024). Metode penelitian panduan lengkap untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran.
<http://repository.mediapenerbitindonesia.com/433/1/%28%2BISBN%29K%20205%20-%20Metode%20Penelitian.pdf>
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi penelitian akuntansi.
- Wahyuni, Astri. (2021). Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan. Makassar : Global RCI.

Jurnal

- Arora, H., March, A., Nieminen, L., Shejuti, S. M., & Walker, T. R. (2024). Defining an effective plastics treaty through national perspectives and visions during early negotiations. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2.
<https://doi.org/10.1017/plc.2024.19>
- Betzold, Carola. (2013). Non-State Actors in International Climate Change Negotiations.
https://ib.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/international-relations-dam/News_AboutUs_PhDProgram/Documents/diss_betzold.pdf&ved=2ahUKEwiqodm5qoaWAxVF3TgGHYZcB7gQFnoECHwQAO&usq=AOvVaw1Otr8GukU9vhsUiQHR3Kw
- Cowan, E., Holmberg, K., Nøklebye, E., et al. (2024). It takes two to tango: the second session of negotiations (INC-2) for a global treaty to end plastic pollution. *J Environ Stud Sci* 14, 428–434.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s13412-024-00906-4>

- Dauvergne, P., Ralston, R., Clapp, J., et al. (2025). The petrochemical historical bloc: Exposing the extent and depth of opposition to a high ambition plastics treaty. *Cambridge Prisms: Plastics*, 3, e16, 1–4 <https://doi.org/10.1017/plc.2025.10010>.
- de Sousa, FDB. (2024). Will the Global Plastics Treaty break the plastic wave? The beginning of a long discussion road. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2, e16, 1–12 <https://doi.org/10.1017/plc.2024.14>.
- Debbah, M., & Rimouche, S. (2026). The Impact of National Interests on Cooperation in Global Environmental Policy. *Problemy Ekorozwoju*, 21(1), 16–29. <https://doi.org/10.35784/preko.7704>
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California management review*, 54(1), 64–87. https://www.researchgate.net/publication/228133505_The_Drivers_of_Greenwashing
- Dreyer, E., Hansen, T., Holmberg, K., et al. (2024). Towards a Global Plastics Treaty: Tracing the UN Negotiations. Lund University. Lund, Sweden.
- Dreyer, E., Hansen, T., Holmberg, K., et al. (2025). Towards a Global Plastics Treaty: Navigating Policy Preferences and Economic Interests. https://www.researchgate.net/publication/395319523_Towards_a_global_plastics_treaty_Navigating_policy_preferences_and_economic_interests
- Gonçalves L.R., Webster D.G., Grilli N.M., et al. (2024). Against the clock to address plastic pollution: Critical challenges to elaborate a comprehensive and ambitious Plastic Treaty.
- Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic communities and international policy coordination. *International Organization*, 46(1), 1–35. https://www.researchgate.net/publication/23990330_Introduction_epistemic_communities_and_international_policy_coordination
- Kiessling, T., Rech, S., Reus, K., et al. (2025). Underrepresented developing States, marginalized communities, big business and procedural injustice -how equal were the UN INC-5.2 Global Plastic Treaty negotiations?. *Cambridge Prisms: Plastics*. 10.1017/plc.2025.10037. https://www.researchgate.net/publication/397196349_Underrepresented_developing_States_marginalized_communities_big_business_and_procedural_injustice_-how_equal_were_the_UN_INC-52_Global_Plastic_Treaty_negotiations
- Koenig-Archibugi, Mathias. (2011). Global governance.
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zürn, M. (1994). The study of international regimes. *European Journal of International Relations*, 1(3).
- Mulya, J. H., & Rini, N. S. (2024). Equilibrium Between Developed and Developing Countries Through International Environmental Law Instruments in the Frame of Climate Change in Indonesia. in 1st